

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, RB.M.,Virdani, D, Kasih. K.D, dan Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya ; Journal Publicuho. Volume 4 Number 2 (May-July)
- Almanzani, N.N.,(2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh ; Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Volume 7, Nomor 1, Feb 2022
- Amaruddin (2018) Metode penelitian, (Yogyakarta: Peramailmu), hlm.93.
- Aprilia, C.P, Sulistyaningsih, T.,dan Salahudin. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur; Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN). VOL. 10 NO. 1(2022).
- Asmono, Y.A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya ; PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol. 2 No. 04, Juli (2022)
- Asyafani, M, A., Diaz, V., Kiki, D, K., Lukman, A. 2021. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001). Hlm 100-101
- Carl J. Friedrich dalam Wahab, 2001:3, Man and Hts Goverment, New York: McGraw, Hill.
- Dalimunthe, Y.P, dan Susilawati. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III ; Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol 1 No 2 Agustus 2022.
- Darwin tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Halu Oleo, (Kota Kendari:2020).
- Dyah Mutiara Dan Arif Zaenudin, Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan, (Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2014), Hlm.19.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fikri, N dan Sjaaf, A.C. (2022). Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Dki Jakarta ; Jurnal Ilmiah

Indonesia. Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

Fitriyana., Akhmad, N, H., Beni, A. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan

Indonesia, Studi Ilmu Administarasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,(Banten:2020).

Kurnia, Y.S, Rahmawati, R, dan ramdani, F.T. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). Jurnal GOVERNANSI : Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022

Leo Agustino, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Pengalaman Indonesia, Studi Ilmu Administarasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Banten:2020).

Leo Agustino, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Pengalaman

Niken, Mia, P.,Septiana, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali ; Jurnal Syntax Admiration. Vol. 2 No. 11 November 2021.

Ningsih, D.R. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021 ; JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022

Nugroho, D., Subhan, H., Agus, I. 2022. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 11 (1). ISSN 2442-6962

Nugroho, D.,Subhan, dan Irgan A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon) ; JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 11 No. 1 (2022)

Oktary, M. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan Msn Approach : (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022

Pater Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

(Jakarta: Modern English Perss, 2002),Hlm 1598.

- Pudjianto, S. Y., dkk. 2021. Komunikasi Dalam Upaya Penerapan Kebijakan Pencegahan Virus Covid-19 Di Kota Singkawang. *Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Hal 111-120.
- Puteri, A, E., Esa, Y., Nabilla, P, M., Atika, A, F., Yohanes, S, W., Novita, T. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19 (1)
- RB M. Akbar T. A. P., Diaz, V., Kiki, D, K., Lukman, A. 2019. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*. 4 (2). 501-510
- Sari, F.H, dan Hasanah, A.U. (2022). Analisis Implementasi Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang ; Junaidi (*Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*). E-ISSN 2807-6540.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2011), Hlm 178.
- Siregar, R, Prabawati, I. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid - 19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Publika*. Volume 10 Nomor 2, Tahun 2022, 471-486.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) Hlm.82
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2008) Cet 4, Hlm. 102
- Supriyadi, *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, (Kota Palu:2020).
- Taufiqurakhman, *kebijakan publik*, (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers). Hlm 4-5.
- Unddin B. Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV SAH MEDIA.2017). hlm 119-128
- Utami, F. 2022. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. *Jurnal Ibum Administrasi Negara*. 20 (1). ISSN-1411-948CCXX
- Wahdaniyah, N. 2020. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar

Widharyadi, S.W, Ningrum, S, dan Widianingsih, I. (2022). Implementasi Program Vaksinasi Di Kabupaten Tanggamus. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik. Volume 5 Nomor 1 Bulan April Tahun 2022 : 47 – 58

Yuliza, W.T.,Nursya, F.,Rahma, G (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang ; JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan). April, 2022 Volume 6 No. 1

LAMPIRAN

Lampiran 1

BEL ETIK DAN EMIK PENELITIAN

NO	KATEGORI	EMIK	ETIK
1	Komunikasi	hasil wawancara diatas maka diketahui persoalan utama dalam hal komunikasi selama program vaksinasi COVID-19 adalah adanya informasi-informasi yang keliru atau berita hoax tersebar di masyarakat. dalam hal ini pemerintah kabupaten maluku barat daya telah rutin melaksanakan pendekatan kepada masyarakat secara langsung ataupun kepada para tokoh yang ada di masyarakat, serta berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19.	Kesalahan atau kurangnya informasi menjadi penyebab menyebarkan hoax, sehingga sosialisasi kepada masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat untuk mengurangi informasi yang salah di masyarakat. Tokoh masyarakat dapat dilibatkan agar masyarakat menjadi lebih yakin akan informasi yang diberikan
2	Sumber Daya	hasil wawancara diatas maka diketahui Sumber daya untuk penanganan vaksinasi COVID-19 hingga saat ini dianggap masih memadai, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga biayanya. Sumber daya manusia juga telah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan	Jumlah sumber daya yang ada tentu harus dipertimbangkan berdasarkan luas wilayah dan jumlah masyarakat, sehingga mampu melaksanakan vaksinasi sesuai target yang diberikan. Selain itu perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber dayanya

		pengetahuan dan kompetensinya mengatasi persoalan dilapangan.	
3	Disposisi	Hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Maluku Barat Daya terdiri dari beberapa Tim baik dari dinas kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Juga TIM TNI-Polri. Pendistribusian tim vaksinator sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan berdasarkan jumlah dan target sasaran vaksinasi yang akan dilakukan, dimana vaksinator juga telah dilengkapi dengan pembekalan terkait vaksin COVID-19.	Pelaksanaan vaksinasi dilakukan mengikuti Instruksi pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan bersama TNI-Polri sebagai TIM vaskinator.
4	Struktur Organisasi	Hasil wawancara diketahui bahwa secara struktur organisasi penangan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kabupaten Maluku Barat Daya diketuai langsung oleh Bupati Maluku Barat daya yang dibantu oleh 8 ketua sebagai koordinator pelaksana. Pengambilan keputusan selama pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Kendala yang dialami secara birokrasi adalah kendala komunikasi pada tim pelaksana yang memiliki jangkauan sinyal yang buruk, sehingga memperlambat koordinasi pada setiap	Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di ketuai oleh Bupati Maluku barat daya dan dibantu oleh 8 ketua pelaksanaan. Koordinasi antarstake holder menjadi hal penting untuk dilaksanakan sebagai koordinasi sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

		<p>TIM. Selain itu yang menjadi kendala dalam birokrasi juga adalah demograsi yang cukup luas dan merupakan daerah kepulauan sehingga cukup memiliki atensi tinggi untuk menjangkau tim yang ada di daerah terluar.</p>	
--	--	---	--

Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA

SUBJEK PENELITIAN : Informan Kunci dan Informan Biasa

Pertanyaan :

STRUKTUR BIROKRASI

1. Struktur organisasi Satgas Covid-19?
2. kewenangan dan tanggungjawab antar bagian Satgas Covid-19
3. SOP Kabupaten Maluku Barat Daya dalam vaksinasi Covid-19
4. Dampak Vaksinasi
5. Proses pengambilan keputusan terkait vaksinasi Covid-19

KOMUNIKASI

1. Proses komunikasi pada masyarakat terkait Vaksin Covid-19.
2. hambatan saat proses sosialisasi
3. Cara mengatasi hambatan tersebut
4. Komunikasi dengan pihak-pihak intern dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19
5. Cara komunikasi dengan pihak-pihak ekstern dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19

SUMBER DAYA

1. Jumlah Satuan Gugus Penanganan Covid-19, terkait dengan vaksinasi Covid-19
2. Tercukupinya jumlah satuan tugas penangan Covid-19
3. Kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan
4. Pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM
5. Sarana sebagai penunjang kegiatan vaksinasi Covid-19
6. sumber anggaran pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19
7. Proses pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19
8. Anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan

DISPOSISI / SIKAP PELAKSANA

1. Sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi peraturan vaksinasi Covid-19
2. Dukungan pemerintah daerah terhadap vaksinasi Covid-19
3. komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi Covid-19
4. Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19
5. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi vaksinasi Covid-19 tersebut.

Lampiran 3
DOKUMENTASI



Plt. Kadis Kesehatan Kab.MBD
Marthen Rahakbauw, AMK



Kabid P2P
Semuel F. Tilukay, SKM



Kasie Imunisasi & Surveilans
Meyril S. Tuhuleruw, SKM



Pemegang Program Imunisasi
Thomas Leunupun, A.md.KI



Sekretaris BPBD Kab.MBD
(Juru Bicara Satgas Covid-19)
Ardon W.Loyra, SKM



Kadis Kominfo Kab.MBD
Weruhair A.A. Petrus, SE



**Direktur RSUD Tiakur
dr. Jimmy Sindihanis**



**Kepala Puskesmas Tiakur
(Ketua Tim Vaksinator)
dr. Adry Ruimasa**



**Plt. Kepala Dinas BPBD
Dalma Eoh, SP**



**Kepala Dinas Kesbangpol
A.Esau**



**Imam Masjid Tiakur
(Tokoh Agama)
Haji Masrudin**



**Ketua Majelis Jemaat Tiakur
(Tokoh Agama)
Pendeta R. M. Mail, S.Si**



Tokoh Masyarakat
Max Akse

Lampiran 4

PERSURATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 385658
E-mail : fk.m.unhas@gmail.com, website : <https://fk.m.unhas.ac.id/>

No : 5564/UN4.14/PT.01.04/2022
Lamp :-
Hal : Pengambilan Data Awal

31 Mei 2022

Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya
Di -
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Joska Rap Rap
Nomor Pokok : K052211013
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan pengambilan data mengenai :

1. Data Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2022
2. Data Kejadian Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan 2022

data tersebut akan digunakan untuk penyusunan proposal tesis dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Aminuddin Syam, SKM., M.Kes., M.Med.Ed
NIP. 19670617 199903 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FKM Unhas
2. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/22/DPMPTSP/III/2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 4. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Surat Dari Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin Nomor:20509/UN4.14.1/PT.01.04/2023 Tanggal 07 Maret 2023
 7. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 070/05/BKBP/REK/II/2023 Tanggal 07 Maret 2023

Pertimbangan : Bahwa dengan dasar tersebut diatas, maka diterbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) :

Nama : **JOSKA RAP RAP**
NIM : K 052211013
Judul Penelitian : **"Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya "**
Lokasi : Tiakur, Kabupaten Maluku Barat daya
Waktu : 3 (Tiga) Bulan
Program Studi : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
Status : Mahasiswi
Penanggung Jawab : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin

Sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Penelitian tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian agar peneliti wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada instansi/unit kerja terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
2. Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
3. SKP ini hanya berlaku bagi penelitian tersebut.
4. Tidak menyimpang dari tujuan yang diajukan dan tidak keluar dari lokasi penelitian.
5. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan penelitian.
6. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat-istiadat setempat.
7. Setelah melakukan penelitian, peneliti wajib melaporkan 1 (satu) Eksemplar hasil penelitian kepada Bupati Maluku Barat Daya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. SKP ini berlaku dari 08 Maret 2023 s/d 08 Juni 2023 dan dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 08 Maret 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Direktur RSUD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Tim Satgas Covid-19 Tiakur di Tiakur;
5. Lurah Tiakur di Tiakur;
6. Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur di Tiakur;
7. Imam Masjid Nurul Iman Kalwedo di Tiakur;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TIAKUR

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 /bs/BKBP/REK/III/2023

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Surat Dari Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasaniddin Nomor : 20509/ UN4.14.1/PT.01.04/2023 Tanggal 07 Maret 2023
- Pertimbangan : Bahwa dengan dasar tersebut diatas kami tidak keberatan untuk memberikan izin kepada :
- Nama : **JOSKA RAP RAP**
NIM : K 052211013
Jurusan/Prodi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Judul : **"Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 di Kabupaten Maluku Barat Daya"**.
Lokasi : Tiakur ,Kabupaten Maluku Barat Daya.
Waktu : 3 (tiga) Bulan
Untuk : Menyatakan **Menerima** untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penelitian (SRP) dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada tanggal : 08 Maret 2023

a.n BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


ARESTOULES J. EZAUW, S.PI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700110 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku barat Daya ;
3. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TIAKUR

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 070 /G. b /BKBP/Ket/VII/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARESTOULES J. EZAUW, S.Pi, M. Si**

NIP : 19700110 200212 1 007

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I

Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kab. MBD

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Joska RapRap**

NIM : K052211013

Fakultas / Prodi : Administrasi Kebijakan Kesehatan

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan penelitian selama 1 (satu) bulan dengan judul :**"Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya."** Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas Tiakur, Nomor : 400.7/365/VII/2023, Tanggal 07 Juli 2023 Perihal Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiakur, 10 Juli 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

ARESTOULES J. EZAUW, S.Pi, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700110 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Barat Daya (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Hasanudin di Makassar;
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Makassar;
4. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat di Masyarakat;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.